

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Indra Aryani
NIM 16.0102.0049

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
Indra Aryani
NIM 16.0102.0049

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

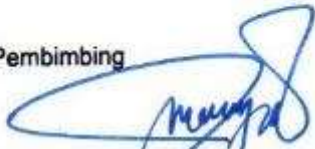
Indra Aryani

NPM 16.0102.0049

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2020

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Faqiatul Mariya Waharani, S.E., M.Si

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Dr. Lilik Andriyani, M.Si

Ketua

Faqiatul Mariya Waharani, S.E., M.Si

Sekretaris

Betari Maharani, S.E., M.Sc

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 10 SEP 2020

Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Aryani
NIM : 16.0102.0049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 08 September 2020

Indra Aryani
Indra Aryani



Indra Aryani
NIM. 16.0102.0049

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indra Aryani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 17 Agustus 1997
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Manggis RT 0026 RW 0013, Candiretno, Secang,
Magelang
Email : indra.aryani24@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2004-2010) : SD Negeri Payaman 1
SMP (2010-2013) : SMP Negeri 1 Magelang
SMA (2013-2016) : SMK Negeri 2 Magelang
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 08 September 2020

Pembuat Pernyataan



Indra Aryani
NPM. 16.0102.0049

MOTTO

“Apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
(QS 3: 159)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah,6-8)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran).”**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Faqiyatul Mariya Waharini, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Ibu Dr. Lilik Andriyani, M.Si selaku penguji 1 (satu) yang telah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Betari Maharani Putri, S.E., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang telah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Bapak dan Ibu selaku orang tua terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
7. Teman-teman akuntansi angkatan 2016 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, 08 September 2020



Indra Aryani
NPM. 16.0102.0049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Penelitian.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Kontribusi Penelitian	9
E.Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	11
A.Telaah Teori.....	11
1. Teori <i>Stewardship</i>	11
2. Kompetensi Aparatur	12
3. Partisipasi Masyarakat.....	13
4. Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	14
5. Aksesibilitas	16
6. Akuntabilitas	17
B.Telaah Penelitian Sebelumnya.....	18
C.Perumusan Hipotesis.....	21
D.Model Penelitian.....	27
BAB III METODA PENELITIAN	28
A.Populasi dan Sampel.....	28
B.Data Penelitian	29

C. Alat Analisis Data	35
1. Statistik Deskriptif	35
2. Uji Kualitas Data	35
3. Analisis Linier Berganda	36
4. Pengujian Hipotesis	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Statistik Deskriptif Data	40
B. Statistik Deskriptif Responden	40
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	42
D. Uji Kualitas Data	44
1. Uji Validitas	44
2. Uji Reliabilitas	46
E. Analisis Regresi Linear Berganda	46
F. Pengujian Hipotesis	47
1. Uji R ² (Koefisien Determinasi)	47
2. Uji F	48
3. Uji t	49
G. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN	57
A. Kesimpulan	57
B. Keterbatasan Penelitian	57
C. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang	6
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya.....	18
Tabel 3. 1 Konstruk, Dimensi, dan Indikator Variabel	34
Tabel 4. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	40
Tabel 4. 2 Profil Responden.....	41
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	42
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4. 5 <i>Cross Loading</i>	45
Tabel 4. 6 Pengujian Reliabilitas	46
Tabel 4. 7 Koefisien Regresi.....	47
Tabel 4. 8 Uji R^2	47
Tabel 4. 9 Uji F	48
Tabel 4. 10 Uji t	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	27
Gambar 3. 1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Uji F)	38
Gambar 3. 2 Penerimaan Hipotesis Uji t.....	39
Gambar 4. 1 Nilai Uji F.....	49
Gambar 4. 2 Kurva Penerimaan Uji t Variabel Kompetensi Aparatur	50
Gambar 4. 3 Kurva Penerimaan Uji t Variabel Partisipasi Masyarakat.....	51
Gambar 4. 4 Kurva Penerimaan Uji t Variabel Sistem Pengendalian Internal	51
Gambar 4. 6 Kurva Penerimaan Uji t Variabel Aksesibilitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 2. Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner	72
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah).....	73
Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner (Setelah Validasi).....	89
Lampiran 5. Statistik Deskriptif.....	105
Lampiran 6. Uji Validitas.....	106
Lampiran 7. Uji Reliabilitas	115
Lampiran 8. Bukti Penyebaran Kuesioner	117

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada desa se-Kecamatan Kajoran)

**Oleh:
Indra Aryani**

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-Kecamatan Kajoran. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 121 responden, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu pegawai yang mempunyai jabatan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra, dan operator sistem keuangan desa. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi sistem pengendalian internal maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Sedangkan kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, aksesibilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan jaman, kini desa telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam hal tata administrasi pemerintahan. Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan diharapkan nantinya akan dapat menjadikan desa yang memiliki satu kesatuan yang utuh dalam hal memajukan desanya. Desa memiliki peran penting terutama pada perangkat desa setempat dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang jauh lebih besar dan juga terkait pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju desa yang lebih mandiri.

Dikutip dari www.bpkp.go.id saat ini Kabupaten Magelang telah siap untuk mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP). “terdapat 200 desa yang akan

mengikuti plotting atau pengimplementasian Siskeudes Versi 1.6 sementara sejumlah 157 desa lainnya akan menyusul di kesempatan berikutnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari magelangkab.go.id terkait dengan bimbingan teknis Siskeudes 2019 secara mandiri oleh PD-PLD Kabupaten Magelang. Dalam berita tersebut dijelaskan agar dapat mendampingi desa lebih maksimal dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes, Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Magelang perlu meningkatkan kapasitas dirinya dalam pengetahuan tentang aplikasi Siskeudes. Dikarenakan masih banyak perangkat desa yang belum begitu paham dengan siskeudes, baik PD maupun PLD dari masing-masing Kecamatan di kabupaten Magelang berinisiatif mengadakan Bimbingan Teknis aplikasi siskeudes secara mandiri.

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang dikelola sangat banyak. Pemberian dana ke desa yang cukup besar dan jumlah pelaporan yang beragam dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggung jawab yang besar oleh aparat pemerintah desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan desa, dimana segala kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan harus sesuai dengan ketentuan agar nantinya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*).

Pengelolaan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang baik dan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat penting agar nantinya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Adanya anggaran dari APBN yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Perangkat desa dapat meningkatkan kompetensinya dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola suatu anggaran karena dengan adanya kompetensi yang memadai maka akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Novita (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain kompetensi yang baik, pengelolaan dana desa juga memerlukan adanya Sistem pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan

dapat berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kesuksesan suatu pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat diperlukan untuk menggali potensi yang dimiliki sebuah desa dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan pembangunan di dalam lingkup desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan memberikan dampak positif pada program-program yang nantinya akan dijalankan oleh desa yang mendapatkan anggaran dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu berbagai kegiatan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen. Namun, penelitian Listyawati *et al.*, (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa kemudahan akses berbagai pihak dalam menggunakan laporan keuangan harus diutamakan. Para pengguna laporan keuangan harus dapat mengakses informasi mengenai laporan keuangan dengan lancar. Aksesibilitas laporan keuangan desa yang baik nantinya akan

mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) yang menyatakan bahwa suatu proses komunikasi yang baik antara publik dan pemerintah akan mendukung penggunaan informasi laporan keuangan yang efektif.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki karena dengan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dengan 372 desa. Dari 372 desa yang ada di Kabupaten Magelang tersebut semuanya mendapatkan dana desa kecuali 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Sawitan. Sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa pemerintah dulunya sangat fokus terhadap faktor pemerataan, namun saat ini lebih berfokus pada keterlambatan ekonomi. Pengalokasian dana desa pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Magelang ini digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. 1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Besaran Dana
1	Kajoran	22.632.111.000
2	Grabag	22.330.204.000
3	Tegalrejo	16.116.194.000
4	Kaliangkrik	16.090.053.000
5	Pakis	15.947.180.000
6	Windusari	15.934.873.000
7	Salaman	15.859.241.000
8	Borobudur	15.659.696.000
9	Secang	14.943.900.000
10	Candimulyo	14.869.864.000
11	Srumbung	13.175.805.000
12	Ngablak	12.576.628.000
13	Sawangan	11.985.140.000
14	Tempuran	11.902.620.000
15	Dukun	11.680.921.000
16	Bandongan	11.275.453.000
17	Mungkid	11.069.661.000
18	Muntilan	10.251.655.000
19	Mertoyudan	9.733.870.000
20	Salaman	9.311.645.000
21	Ngluwar	6.266.185.000
	Jumlah	289.612.899.000

Sumber : Peraturan Bupati Magelang nomor 2 Tahun 2019

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dari total 21 kecamatan yang mendapatkan kucuran dana desa, Kecamatan Kajoran merupakan penerima dana desa terbesar di Kabupaten Magelang. Dengan jumlah besaran dana tertinggi di Kabupaten Magelang maka pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Semua kegiatan pemerintahan desa harus sesuai dengan ketentuan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) dengan menggunakan seluruh variabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel aksesibilitas

dengan alasan aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Menurut Apriliani *et al.*, (2015), aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah desa sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan desa.

Perbedaan kedua yaitu penelitian ini dilaksanakan pada desa di Kecamatan Kajoran karena merupakan kecamatan yang mendapatkan kucuran dana desa dengan jumlah paling tinggi di Kabupaten Magelang. Kecamatan Kajoran juga sedang mengadakan musrenbang yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kesehatan SDM Desa. Kecamatan Kajoran memiliki topografi sebagian besar wilayahnya berbukit dan bergunung. Sebanyak 15 desa berada di sekitar hutan, bahkan Desa Krinjing berada di tengah hutan. Sutopati merupakan desa terpadat. Sementara desa dengan penduduk terendah yaitu Ngargosari. Perencanaan kependudukan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dasar dan pelatihan. Hal ini berkaitan dengan semakin banyak dana desa yang diterima maka semakin besar tanggungjawabnya. Sejauh ini di Kecamatan Kajoran belum terdapat tindak kecurangan dana desa meskipun dengan jumlah dana desa terbesar di

Kabupaten Magelang. Berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan diatas maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa se-Kecamatan Kajoran).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap akuntabilitas Pengelolaan dana desa
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kaitannya dengan faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata bagi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk meningkatkan profesionalisme pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan dalam rangka membuat laporan pertanggungjawaban untuk mengungkapkan kasus korupsi pada dana desa yang ada di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah

dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991) menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan nonprofit lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principals*. Rakyat sebagai *principals* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas, dan jujur pada pihak lainnya.

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan nonprofit lainnya (Haliah, 2012).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat

menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Kompetensi Aparatur

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik (Sagala, 2009). Menurut Rudana (2005), kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*), dan kemampuan (*abilities*) yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam setting pekerjaan.

Umaira & Adnan (2019) menyatakan bahwa hal yang berkaitan

dengan dana desa tentu saja sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai.

Kompetensi dapat didapatkan melalui kegiatan belajar. Dengan kegiatan pembelajaran yang efektif akan memungkinkan individu dapat memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi sebagian masyarakat, belajar memainkan peran penting terutama dalam melanjutkan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus. Lingkungan yang ada di sekitarnya dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi dan juga kemampuan berfikirnya terhadap hal-hal yang telah ditemui di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya muncul dan berkembang melalui proses belajar.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta

mengambil keputusan mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya pemecahan masalah yang terjadi (Muslimin *et al.*, 2012).

Naimah (2017) membedakan jenis partisipasi menjadi empat yaitu, pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, kaitannya dengan menentukan alternatif masyarakat mengenai gagasan atau ide tentang kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan. Kedua partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi ini menyangkut bagaimana masyarakat berkontribusi dalam menjalankan suatu program seperti kegiatan administrasi dan menggerakkan sumber daya. Ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat, menyangkut hasil dari ketercapaian program baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dari segi kualitas seperti peningkatan *output* sedangkan dari segi kuantitas seperti presentase keberhasilan program. Keempat yaitu partisipasi dalam evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan yang tujuannya untuk mengetahui keberhasilan program sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan.

4. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset nagara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangn. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins, 2011).

5. Aksesibilitas

Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Menurut Rohman (2009), aksesibilitas jika dilihat dari perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Menurut Mustofa (2012), aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik. Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa aksesibilitas terkait erat dengan kemudahan dan ketersediaan.

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif.

Menurut Apriliani *et al.*, (2015), aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan menurut Mustofa (2012), aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik

pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya (Mardiasmo, 2006).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Astuty (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparatur, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2	Umaira & Adnan (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
3	Atiningsih & Ningtyas (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
4	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5	Akib (2017)	Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa	Perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
6	Widyatama & Novita (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Kompetensi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD. SPI berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi dana Desa.
7	Yudianto & Sugiarti (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	SPIP berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
8	Mada <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
9	Indrianasari (2017)	Pengaruh peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Variabel perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
10	Nurlaili (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penyajian Laporan Keu. dan Aksesibilitas Berpengaruh Positif terhadap Transparansi & Akuntabilitas D3 Pengelolaan Keuangan Daerah.
11	Hanif <i>et al.</i> , (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun.	Variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
Lanjutan**

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
12	Wahyuni <i>et al.</i> , (2014)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sumber : Data penelitian terdahulu diolah, 2020

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Menurut (Robbins, 2001), kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan juga kemampuan fisik. Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan individu memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku.

Menurut Umaira & Adnan (2019), segala hal yang berkaitan dengan dana desa tentu saja sangat diperlukan sumber daya manusia yang memumpuni dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, jika aparatur desa tidak

memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja akuntabilitas tidak akan tercapai.

Berdasarkan teori *stewardship*, hubungan antara *steward* dan *principals* muncul ketika satu orang atau lebih (*principals*) mempekerjakan *steward* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *steward* tersebut. Hubungan antara *steward* dan *principals* disini akan menjadi satu arah dan seimbang dikarenakan *principals* percaya sepenuhnya jika *steward* tidak akan termotivasi oleh tujuan pribadi melainkan lebih fokus untuk tujuan organisasi. Dengan adanya kompetensi maka akan meningkatkan para pemerintah desa agar dapat dipercaya, dan memiliki integritas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini di dukung oleh penelitian Mada *et al.*, (2017), Atiningsih & Ningtyas (2019), dan Aulia (2018) menunjukkan bahwa kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah

daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih bepihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim & Schachter, 2013). Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki masyarakat, dan mengambil putusan mengenai alternatif solusi untuk penanganan masalah, melaksanakan cara mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam pengevaluasian perubahan yang terjadi.

Dalam teori *stewardship*, *principals* adalah pemerintah dan masyarakat yang mempercayai *steward* atau perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang semestinya. Dalam hal ini masyarakat percaya penuh kepada perangkat desa yang dimana perangkat desa akan melakukan tugas sebagaimana mestinya dan lebih mengedepankan keberhasilan tujuan organisasi. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas. Masyarakat berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh. Berdasarkan pada pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mebgharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

Hasil penelitian Umaira & Adnan, (2019) Atiningsih & Ningtyas, (2019) dan penelitian Mada *et al.*, (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan hasil hipotesis:

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam teori *stewardship* di sini *principals* adalah pemerintah dan masyarakat sedangkan *steward* yaitu perangkat desa. Saat ini kebocoran terkadang masih ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kebocoran dalam suatu sistem. Sistem

Pengendalian Internal dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik Akutabilitas pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2019), Atiningsih & Ningtyas, (2019) dan Widyatama & Novita (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Aparatur dari Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

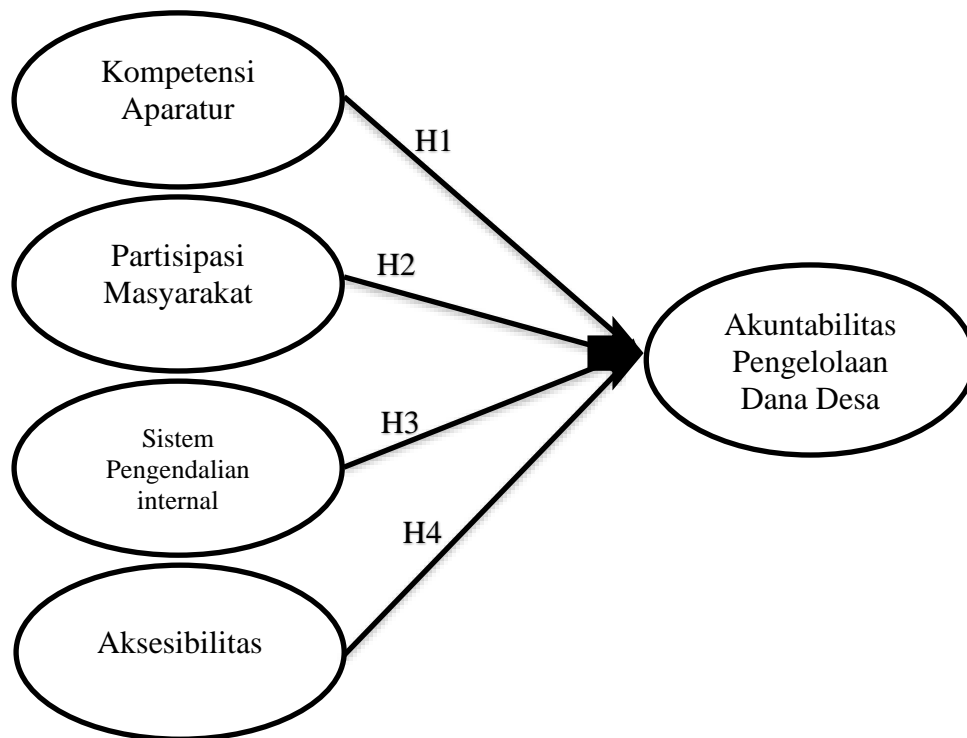
Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif. Akuntabilitas dapat memberikan akses bagi *stakeholders* untuk

mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholders*.

Dalam teori *stewardship*, *principals* adalah masyarakat sedangkan *steward* dalam hal ini adalah perangkat desa. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan dan masyarakat. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (Internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende, 2004).

Penelitian Nurlaili (2016) dan Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hanif *et al.*, (2015) aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Dan Wahyuni *et al.*, (2014) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

D. Model Penelitian**Gambar 2. 1 Model Penelitian**

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah atau komunitas yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 29 Desa di Kecamatan Kajoran yang mendapatkan dana desa. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampelnya yaitu dengan *purposive sampling*, yaitu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretariat desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra, dan operator siskeudes.
2. Tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2007).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil tes wawancara atau hasil kuesioner tentang hal itu. Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan diseleksi terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar apabila terdapat kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih teknik ini dengan mempertimbangkan bahwa teknik survei langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Dependen

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas adalah suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas pemerintah maupun

entitas bisnis sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pemerintah dalam hal ini merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis ketika entitas telah melakukan proses penerbitan efek di pasar modal dan entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Isnalita & Narsa, 2017). Terdapat indikator dari Sande (2013) yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas, diantaranya perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, pelaksanaan pelaporan keuangan dalam mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa. Item-item tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala likeart 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5).

b. Kompetensi Aparatur

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasari seorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria kinerja yang efektif (Vathanophas, 2006). Kompetensi dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai kecakapan, pengertian, keterampilan, sikap, dan juga perilaku. Kompetensi dapat didapatkan melalui kegiatan belajar. Dengan kegiatan pembelajaran yang efektif akan memungkinkan individu dapat memperoleh berbagai pengertian, kecakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Bagi sebagian masyarakat, belajar memainkan peran penting

terutama dalam melanjutkan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus. Lingkungan yang ada di sekitarnya dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi dan juga kemampuan berfikirnya terhadap hal-hal yang telah ditemui di lingkungan sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya muncul dan berkembang melalui proses belajar.

Kompetensi menurut Guy *et al.*, (2002) merupakan sebuah pengetahuan dan juga keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintahan desa. Jumlah dari item pertanyaan yaitu 7 item dengan menggunakan skala Likert 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5). Terdapat indikator dari Roviyantie (2012) yang digunakan untuk mengukur Kompetensi aparatur yaitu pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan keahlian teknis.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil keputusan mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya pemecahan masalah yang terjadi

(Muslimin *et al.*, 2012).

Menurut Heller *et al.*, (1984) dan Sujarweni (2015), partisipasi masyarakat ini dapat diukur dengan menggunakan dimensi pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Item-item tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala likeart 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5).

d. Sistem Pengendalian Internal

SPIP merupakan suatu proses yang sangat integral pada tindakan dan juga kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai atas tercapainya sebuah tujuan organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Menurut Nurmuthmainnah (2015), terdapat 5 indikator yang digunakan dalam mengukur SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal. Item-item tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala likeart 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5).

e. Aksesibilitas

Menurut Mustofa (2012), aksesibilitas yaitu sebuah kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk dapat mengetahui suatu informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik dan benar nantinya akan dapat mewujudkan komunikasi yang baik antara pemerintah dan publik.

Menurut Nurmuthmainnah (2015), ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yaitu terbuka di media massa, mudah diakses, ketersediaan informasi. Item-item tersebut dibuat dalam bentuk kuesioner dengan skala likeart 1-5 yaitu dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), sampai sangat setuju (5).

Tabel 3. 1 Konstruk, Dimensi, dan Indikator Variabel

Konstruk	Dimensi	Indikator
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (Roviyantie, 2012)	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	Pengetahuan Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
	Kemampuan (<i>skill</i>)	Keahlian teknis Kemampuan untuk mencari solusi
	Sikap (<i>attitude</i>)	Inisiatif dalam bekerja Keramahan dan kesopanan
Partisipasi Masyarakat (Heller <i>et al.</i> , 1984), dan (Sujarweni, 2015)	Pengambilan keputusan	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
	Penyusunan anggaran	Mengusulkan rencana anggaran Terlibat dalam rapat paripurna
	Pelaksanaan anggaran	Terlibat mengawasi dan melaporkan Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran Memberikan penghargaan
Sistem Pengendalian Internal (Nurmuthmainnah, 2015)	Proses	Lingkungan Pengendalian Penilaian risiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian internal
		Aksesibilitas (Nurmuthmainnah, 2015)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Peggy Sande, 2013)	Proses	Terbuka di media masa Mudah diakses Ketersediaan informasi Perumusan rencana keuangan Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
		Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan Pelaksanaan pelaporan keuangan dalam mengukur akuntabilitas

Sumber: Data yang diolah, 2020

C. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa suatu data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa ada maksud untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Pengujian dengan statistik deskriptif ini dapat berguna untuk mengetahui nilai mean, distribusi frekuensi, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen. Sehingga, pengujian ini dapat memberikan suatu hasil deskripsi mengenai variabel yang terdapat pada penelitian ini.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Confirmatory Factor Analysis atau CFA yaitu digunakan untuk menguji validitas suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji Validitas merupakan suatu cara untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian (yang dikenal dengan kuesioner) mengukur dengan tepat dan juga benar.

CFA biasanya digunakan para peneliti untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Peneliti dapat melihat nilai loading significant CFA ini dari nilai kritis (*critical ratio*) yang dihasilkan. Nilai kritis (*critical ratio*) adalah sebuah nilai dari uji statistik (*t-test* dan *f-test*) yang menunjukkan tingkat signifikan tertentu. Jika nilai kritis lebih besar dari 1,96 maka terdapat signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95% (Taylor

et al., 2010).

Alat uji lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan juga dapat tidaknya dilakukan analisis faktor yaitu *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai dari KMO ini bervariasi yaitu dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus lebih dari 0,50 untuk dapat dilakukan suatu analisis faktor dan *cross loading* $> 0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yaitu suatu alat uji untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari konstruk atau variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan atau pertanyaan itu konsisten dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama (Ghozali, 2013). Uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan dua kali pengukuran atau lebih terhadap suatu gejala yang sama. Pengujian reliabilitas di dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan cara menghitung *croanbach's alpha* yang digunakan dalam variabel tersebut dikatakan handal jika memberikan nilai *croanbach's alpha* $> 0,70$.

3. Analisis Linier Berganda

Regresi berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk

menganalisis hubungan antara variabel dependen dan beberapa variabel independen.

$$AKN = \alpha + \beta KA + \beta PM + \beta SPI + \beta AKS + \varepsilon$$

Keterangan :

AKN	=	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
A	=	Konstanta
β	=	Koefisien Regresi dari X
KA	=	Kompetensi Aparatur
PM	=	Partisipasi Masyarakat
SPI	=	Sistem pengendalian Internal
AKS	=	Aksesibilitas
E	=	Nilai Error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

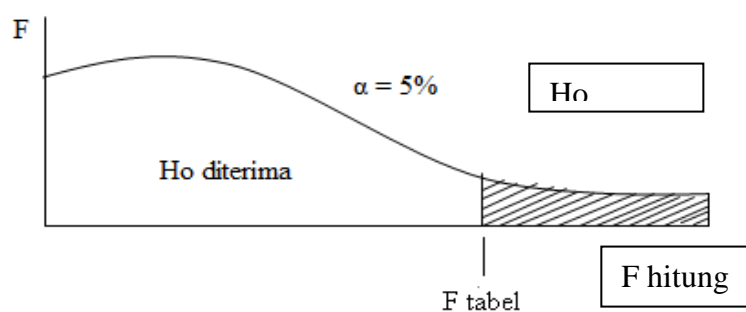
Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi suatu variabel independen (Ghozali, 2013). Uji determinasi (R^2) memperlihatkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, sistem pengendalian Internal, dan Aksesibilitas terhadap variabel independen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. Besarnya koefisien yaitu 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, dan juga sebaliknya. Semakin mendekati 1 maka besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2016).

b. Uji F (Goodness of fit test)

Uji Statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F ini akan menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel

dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan fit atau tidak (Ghozali, 2016). Ketentuan menilai hasil hipotesis Uji F yaitu berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat penyebut ($df = n-k-1$) dimana k yaitu jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $P\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tersebut bagus atau (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $P\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak bagus atau (*tidak fit*).



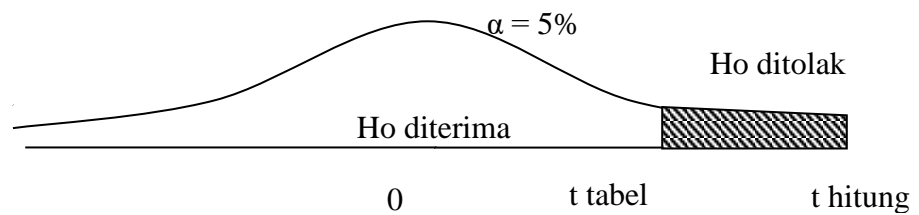
Gambar 3. 1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Uji F)

c. Uji t

Uji t yaitu merupakan suatu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t ini digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan dari nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan untuk

menilai hasil hipotesis uji t yaitu digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2016).

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau P value $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau P value $> \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2 Penerimaan Hipotesis Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 121 aparatur perangkat desa dari 29 Kantor Kepala Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang memiliki jabatan sebagai kepala desa, sekretariat desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra, dan operator siskeudes. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di 29 Desa se-Kecamatan Kajoran sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh kecamatan lain.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, sistem

pengendalian internal, dan aksesibilitas. Masih terdapat variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebar. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah sampel dengan cara menambahkan kecamatan se-Kabupaten Magelang agar lebih mudah untuk menggeneralisasi hasil penelitian dan perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode wawancara atau yang lain serta memperbaiki terlebih dahulu kuesioner yang digunakan dalam penelitian sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi Akuntabilitasa Pengelolaan Dana Desa, seperti peran perangkat desa karena terdapat hubungan antara karakteristik pegawai dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang memiliki pengaruh langsung pada masyarakat. Peran dari perangkat desa diharapkan dapat

mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang dimiliki secara tepat dan mudah (Yesinia *et al.*, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Finance and Management*.
- Akib, M. D. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Apriliani, Alit, N. K., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, dan Aksesibilitas Terhadap Transpa ransi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. *Jurnal Riset Akuntansi Indoneisa*.
- Astuty, E. A. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa se-Kecamatan Muntilan)*.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*.
- Ghozali, I. (2013). Ghozali, Imam (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro. *IOSR Journal of Economics and Finance*.
- Guy, D. M., Allan, J., & Winters. (2002). *Auditing Jilid 1. Edisi Kelima*. Airlangga.
- Haliah. (2012). Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Disertasi Doktor Pada FPS*

UNHAS Makassar.

- Hanif, R., Ratnawati, V., & Saragih, C. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Heller, K., Price, R. ., Reinharz, S., Riger, S., & Wandersman, A. (1984). *Psychology and Community Change: Challenges of the future (2nd ed.)*. Homewood, IL.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*.
- Isnailita, & Narsa, I. M. (2017). CSR Disclosure, Customer Loyalty, and Firm Values (Study at Mining Company Listed in Indonesia Stock Exchange). *Asian Journal of Accounting Research*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2016*. (n.d.).
- Kim, S., & Schachter, H. L. (2013). Citizen Participation in the Budget Process and Local Government Accountability. *Public Performance & Management Review*.
- Listyawati, D., Sarmiati, Dan, & Asmawi. (2019). Komunikasi Perangkat Nagari dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019*, 9(1), 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4143>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017a). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017b). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL."*
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. In *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan

- Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang.
Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Naimah. (2017). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Tesis Dipublikasikan. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.*
- Nurlaili. (2016). Pengaruh Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis) Effect Of Financial Statements Presentation Of Financial Statements And Accessibility Of Region. *JOM Fekon*, 3(1).
- Nurmuthmainnah, W. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.* (n.d.).
- Robbins, S. P. (2001). Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. In *Prenhallindo.*
- Rohman, A. (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Dijawa Tengah). *Jurnal Akuntansi & Bisnis.*
- Roviyantie, D. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya). *Skripsi (Dipublikasikan). Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.*
- Rudana, N. (2005). Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro.*
- Sagala, R. dan. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. *Rajawali Pers.*
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi, 2013 - Ejournal.Unp.Ac.Id.*
- Shende, S. dan T. B. (2004). Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. *UN DESA.*
- Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. *Bandung: Alfabeta.*
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

- Kualitatif, dan R&D Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1>. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono, M. P. K. (2007). *Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Taylor, S., Wakem, M., Dijkman, G., Alsarraj, M., & Nguyen, M. (2010). A practical approach to RT-qPCR-Publishing data that conform to the MIQE guidelines. In *Methods*.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.
- Vathanophas, V. (2006). Competency Requirements for Effective Job Performance in Thai Public Sector. *Contemporary Management Research*.
- Wahyuni, P. S., Luh, N., Sulindawati, G. E., Herawati, N. T., Jurusan,], & Program, A. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*.
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *STIE Panca Bhakti. Palu*, 02(02), 1–20.
- Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari. (2018). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.